



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2020/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
SUB UNIT KERJA : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIYANA
2. Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
3. NHK : 490483

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	352.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 577 m2/190 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 226.000.000		
2. Tanah Seluas 814 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 126.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	303.800.000
1. MOBIL, TOYOTA PENUMPANG Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.800.000		
3. MOTOR, YAMAHA MATIK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
4. MOBIL, HONDA PENUMPANG Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	12.101.522
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	218.307.118
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	889.208.640
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	889.208.640

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang



diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.